

Mendagri Minta Daerah Hemat

JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan langkah penghematan anggaran. Salah satunya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, pihaknya telah membuat edaran ke daerah untuk melakukan efisiensi.

Kemendagri, kata dia, sudah menyiapkan pedoman pembahasan anggaran untuk tahun 2013 dengan prinsip efisiensi. "Saya minta dalam pembahasan legislatif dan eksekutif di daerah, prinsip itu dijalankan," tutur Gamawan, kemarin.

Item perjalanan dinas menjadi salah satu yang mendapat perhatian. Gamawan meminta pelaksanaan perjalanan dinas tidak sampai memakan porsi anggaran yang besar. "Tidak perlu jalan berulang-ulang dan mengefisienkan jumlah orang yang berangkat, supaya jangan boros," imbaunya.

Penghematan yang dilakukan, menurut mantan gubernur Sumatera Barat itu, bisa dialokasikan untuk belanja modal. Sehingga bisa member manfaat yang lebih bagi daerah. "Infrastruktur kita belum sempurna, masih banyak kekurangan," kata Gamawan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dia mengakui kewenangan pembahasan anggaran ada di tangan pemerintah daerah. sehingga pemerintah pusat tidak bisa ikut campur lebih jauh. Pemerintah pusat hanya membuat rambu-rambu



Gamawan Fauzi

atau norma dalam membahas anggaran.

"Standar itu antara lain standar pelayanan minimal, itu yang dibuat di pusat. Tetapi materinya itu yang dibuat oleh daerah," urai pria yang juga pernah duduk sebagai

bupati Solok itu.

Lantas, bagaimana jika ada daerah yang melanggar norma standar itu? Gamawan mengatakan, pemerintah pusat bisa melakukan koreksi kepada daerah tersebut. Jika levelnya kabupaten atau kota, maka yang mengoreksi adalah provinsi. "Sistemnya kita bangun seperti itu. Saya berharap koreksi tidak perlu terjadi kalau langkah itu sudah diambil oleh pemerintah daerah, ujar Gamawan.

Hingga saat ini, kata dia, daerah yang mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. "Itu kita ingatkan di pusat, baik kementerian atau lembaga, dan daerah agar semakin baik. Di daerah masih kurang," kata Gamawan.

Sebelumnya, BPK menyebutkan, ada pemborosan yang dilakukan pemerintah seperti perjalanan dinas yang masih disalahgunakan. Nilainya diperkirakan mencapai 40 persen dari keseluruhan anggaran untuk perjalanan dinas. BPK meminta sistem pengawasan internal di pemerintah pusat maupun daerah lebih diperketat. (fal)